

Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa Lamantu Kabupaten Kepulauan Selayar

Effectiveness of the Use of the Village Fund Budget for the Sustainable Development of Lamantu Village, Selayar Islands Regency

Rostini Hasanuddin¹, Nur Aqidah², Jumiati Nurdin³

^{1,3}Magister Manajeme, Universitas Indonesia Timur
(rostinimm@gmail.com)

²Akuntansi, Universitas Indonesia Timur
(nuraqidah@gmail.com)

³Manajeme, Universitas Indonesia Timur
(jumiati2608@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran dana desa terhadap pembangunan berkelanjutan pada desa lamantu kecamatan pasimarannu kabupaten selayar. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis laporan penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan berkelanjutan di desa lamantu. Lokasi desa lamantu kecamatan pasimarannu, kabupaten selayar dan waktu penelitian, september.sampai dengan oktober 2018. variabel bebas adalah penggunaan anggaran dana desa (X). Variabel terikat adalah Pembangunan Berkelanjutan (Y). Pengumpulan data secara Observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan dana desa di desa lamantu sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. dengan penggunaan dana bidang penyelenggaraan pemerintah desa lamantu, bidang ini memerlukan dana Rp.470.936.712 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini lebih fokus pada belanja pegawai dan operasional serta sistem administrasi desa lamantu tahun anggaran 2016. bidang pelaksanaan pembangunan desa. 64% total anggaran digunakan untuk pembangunan. sebanyak Rp.641.158.281 digunakan pembangunan atau peningkatan jalan desa, pembangunan rabat beton, pembangunan prasarana pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. bidang pembinaan masyarakat menyerap 3%, yaituRp.82.371.000 dengan program yaitu pembinaan pemuda dan olahraga, kesenian dan sosial budaya, penanggulangan ilegal logging dan ilegal fishing, penghijauan tingkat desa, dan pembinaan pendidikan santri. bidang pemberdayaan masyarakat desa lamantu, anggaran 15% atau sekitar Rp.237.809.228 melakukan peningkatan kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat, kegiatan bantuan perbaikan Gizi buruk untuk Balita, Ibu hamil dan keluarga miskin, Kegiatan tim penggerak PKK, kegiatan orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD, kegiatan Kabupaten sehat, dan kegiatan peningkatan kapasitas peternakan/perikanan/pertanian.

Keywords:

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effectiveness of using the village fund budget for sustainable development in Lamantu Village, Pasimarannu District, Selayar Regency.

This type of descriptive research with a qualitative approach aims to provide a systematic, factual and accurate description of the analysis of reports on the use of village funds in sustainable development in Lamantu village. Location of Lamantu village, Pasimarannu sub-district, Selayar district and research time, September to October 2018. The independent variable is the use of the village fund budget (X). The dependent variable is Sustainable Development (Y). Observational data collection. The results showed that the effectiveness of the use of village funds in Lamantu village was quite good and in accordance with the needs of the community. development carried out based on the results of an agreement by mutual deliberation. with the use of funds for the administration of the Lamantu village government, this field requires funds of Rp.470.936,712 of the total budget provided. This field focuses more on personnel and operational expenditures as well as the Lamantu village administration system for the 2016 fiscal year. 64% of the total budget is used for development. as much as Rp.641,158,281 used for the construction or improvement of village roads, construction of concrete rebates, construction of educational infrastructure and construction of other facilities and infrastructure. the field of community development absorbs 3%, namely Rp. 82,371,000 with programs namely youth development and sports, arts and socio-culture, prevention of illegal logging and illegal fishing, reforestation at village level, and education of santri. In the field of community empowerment in Lamantu Village, a budget of 15% or around Rp. 237,809,228 carries out capacity building for Community Institutions/Groups, activities to improve malnutrition for toddlers, pregnant women and poor families, PKK mobilizing team activities, orientation activities for PPKBD and Sub PPKBD meetings , healthy Regency activities, and livestock/fishery/agriculture capacity building activities.

Keywords: *Village Fund, Budget Effectiveness, Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatann transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, system informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani dkk., 2010: 206). UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan ha-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat menyejahterahkan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap

desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10% dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp.59,2 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp.104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-indonesia. Dana tersebut nantinya akan di alirkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong sepersenpun. Sememntara pola penyaluran dana desa, menggunakan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh Kementrian Pekerjaan Umum, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP).

Dana Desa sebagai stimulus pembangunan Desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan

dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. Desa Lamantu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pasimarannu. Pasimarannu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pasimarannu berjarak sekitar 65 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut kurang lebih 11 jam. Desa Lamantu merupakan Desa baru dan belum lama dibentuk dan masih banyak memiliki kekurangan termasuk dalam persoalan infrastruktur Desa yang belum memadai. Seperti jalan Desa masih banyak yang belum di aspal dan kantor Desa yang belum selesai dibangun.

METODE

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis laporan penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan berkelanjutan di desa lamantu. lokasi desa lamantu kecamatan pasimarannu, kabupaten selayar dan waktu penelitian, september.sampai dengan oktober 2018. variabel bebas adalah penggunaan anggaran dana desa (X). variabel terikat adalah Pembangunan Berkelanjutan (Y). Pengumpulan data Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu paratur desa dan masyarakat desa dengan masalah laporan dana desa. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut perkembangan wawancara itu secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara *depth interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi dari sebuah pembangunan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri. Dari dasar inilah penelitian dilakukan di Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu dalam rangka melihat efektifitas pembangunan desa yang besumber dari dana desa. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

- a. Desa Swadaya
Merupakan Desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan budaya adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.
- b. Desa Swakarsa
Merupakan Desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
- c. Desa swasembada
Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berembang dan maju dengan pettani

yang tidak terkait dengan adat dan istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk disetiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal, Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%
- b) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk disetiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP). Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
- c) Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntunan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, Maka dengan adanya konsep Sustainable Development yang kemudian disebut SD akan beruaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang.

Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987 pembangunan berkelanjutan

adalah terjemahan dari bahasa Inggris "sustainable development". Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Desa Lamantu pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.450.000.000. Dalam proses penggunaan dana tersebut terjadi kelebihan anggaran sehingga digunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebanyak Rp. 12.892.279. Sehingga Anggaran yang digunakan dalam tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.437.107.721.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lamantu tersebut dalam kurun No 1 Tahun 2017. Dari keseluruhan dana yang ada disusun empat bidang program seperti yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lamantu. Keempat bidang program tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamantu
- b) Bidang ini memerlukan dana Rp. 470.936.712 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini lebih fokus pada belanja pegawai dan operasional serta sistem administrasi Desa Lamantu Tahun Anggaran 2016.
- c) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang ini merupakan bidang prioritas yang hampir 64 % dari semua total anggaran digunakan untuk pembangunan. Sebanyak Rp. 641.158.281 digunakan untuk beberapa pembangunan yaitu pembangunan / peningkatan Jalan Desa, pembangunan Rabat Beton, pembangunan Gapura dan Batas Desa, pembangunan Prasarana Pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana Lainnya.
- d) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Lamantu

Bidang ini menyerap 3 % dari total anggaran yang ada atau sejumlah Rp. 82.371.000 dengan beberapa program yang dilakukan seperti pembinaan Pemuda dan Olahraga, Kesenian dan Sosial Budaya, Penanggulangan Ilegal Logging dan Ilegal Fishing, Penghijauan Tingkat Desa, dan Pembinaan Pendidikan Santri.

- e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamantu
Anggaran dalam bidang ini mencapai 15 % atau sekitar Rp. 237.809.228 Dalam bidang ini dilakukan beberapa hal yang dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat, kegiatan bantuan perbaikan Gizi buruk untuk Balita, Ibu hamil dan keluarga miskin, Kegiatan bantuan tim penggerak PKK, kegiatan orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD, kegiatan Kabupaten sehat, dan kegiatan peningkatan kapasitas peternakan/perikanan/pertanian.

Dari semua bidang kegiatan yang dilakukan juga disiapkan anggaran yang terduga sebesar Rp. 4.832.500 atau 1 % dari dari total anggaran. Berdasarkan observasi awal pemanfaatan dana desa untuk pembangunan banyak di anggarkan mencapai 64 % dari pada untuk pemberdayaan dalam bidang ekonomi produktif. Infrastruktur menjadi penting karena selama ini pembangunan masih sangat minim sehingga masyarakat masih menggunakan bangunan lama yang terkadang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Menurut salah seorang masyarakat bernama Fauzi menyatakan bahwa “pembangunan yang berdasrakan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti jalan kampung”. Disisi lain penulis juga mewawancarai sekretaris desa Bapak Tamsil. Menurut bapak Tamsil “Pembangunan Desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik karena pasca

konflik desa tidak melakukan pembangunan yang signifikan sehingga pembangunan fisik terus dipacu” Bapak Tamsil menambahkan “pasca pemekaran menjadi desa Lamantu dari desa Bonerate infrastruktur waktu itu sangat minim, latar belakang masyarakat sebagai petani tidak banyak memberi dampak terhadap pembangunan sehingga desa terkesan kumuh dan tidak teratur. Setelah awal tahun 2014 mulai digiatkan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa. MCK, dan lain-lain”

Perkembangan pembangunan infrastruktur desa Lamantu pada dasarnya ada peningkatan walaupun terkesan agak lambat, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dikarenakan posisi desa yang jauh dari perkotaan dan *mainset* (pola pikir) masyarakat yang belum berkembang. Menurut sekretaris desa H.Tamsil pembangunan sangat terasa berkembang setelah beberapa tahun mulai dengan adanya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan serta bantuan dari pihak-pihak pemerintahan sebagai bagian dari rekonsiliasi. H.Tamsil menambahkan pembangunan tidak memiliki hambatan yang berarti sehingga pelan-pelan pembangunan tercipta sesuai harapan warga. Sebagai bahan pembandingan penulis juga mewawancarai beberapa warga mengenai pembangunan desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut Amiruddin dalam masa pemekaran hampir tidak ada pembangunan yang berarti di desa semua serba sederhana. Menurut Amiruddin yang juga seorang warga menyebutkan pertumbuhan pembangunan desa dulu tidak sehebat selama ini, dulu masyarakat hanya disibukkan oleh pekerjaan bertani tanpa banyak berpikir tentang pembangunan desa. Mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diberikan oleh pemerintah penulis melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan warga. Menurut Fauzi, dana yang bersumber dari Alokasi

Dana Desa (ADD) selama ini digunakan untuk membangun sejumlah sarana infrastruktur dalam rangka kemajuan desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan MCK, pembangunan kantor desa, dan pembukaan jalan Tani. Menurut Bendahara ibu Hatija pembangunan selama ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur karena belum banyak infrastruktur yang ada di desa Lamantu. Ibu Hatija menambahkan bahwa seperti kantor desa selama empat tahun terakhir menggunakan kantor pengadilan lama yang ada sebagai kantor desa agar birokrasi desa berjalan dengan baik, baru tahun 2016 dibangun kantor desa yang baru yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dari paparan beberapa warga yang telah diwawancarai mengenai Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berasal dari dana desa telah dibangun beberapa bangunan yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lamantu Kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Walaupun lebih banyak bangunan fisik namun semata-mata pembangunan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti MCK, Peningkatan Jalan, dan Lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis juga meneliti pola pemberdayaan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) Salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa adalah Ridwan mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera. Pembangunan selama ini lebih fokus pada fisik tidak salah akan tetapi kedepan pembangunan yang bersifat pemberdayaan juga harus digiatkan.

Menurut Amiruddin salah seorang masyarakat yang juga salah satu kepala tukang yang ikut bekerja membangun desa. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti

pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat serta budidaya ternak kambing bibit unggul seperti yang dilakukan diwilayah lain.

Nur aeni salah satu staf desa Lamantu menyebutkan pemberdayaan ekonomi dari dana Alokasi Dana Desa cukup penting terutama untuk ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan seperti usaha kios dalam menambah pendapatan keluarga.

Nur aeni juga menambahkan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlangsungan ekonomi warga Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata dengan berprofesi sebagai petani.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

Berkaitan dengan efektifitas penulis lebih dahulu melihat pembangunan yang telah dilakukan tim dari aparat desa. Sebagai pembanding penulis juga melakukan observasi terhadap pembangunan yang sebelumnya. Pembangunan yang telah dilakukan seperti peningkatan beton jalan desa. Pembangunan MCK desa, pagar meunasah, kantor Desa serta Posyandu dan pembangunan lain. Umumnya semua yang menjadi prioritas pembangunan merupakan bangunan baru dan bangunan lama yang dibangun kembali serta ada juga yang direhab.

Menurut kepala desa bapak Taiyeb. Pembangunan yang di utamakan adalah pembangunan yang sangat

mendesak dibutuhkan oleh masyarakat saat itu, jalan yang harus ditingkatkan karena sudah tidak layak lagi terakhir dibangun masa orde baru. Tahun 2016 dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan digunakan untuk membangun.

Tahun 2016 pembangunan diprioritaskan pada pembangunan fisik beberapa buah gedung untuk kebutuhan birokrasi desa, seperti pembangunan kantor Desa, Posyandu, TK/Paud dan Pagar Kantor BPD. Pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar birokrasi desa karena padatnya laporan pertanggungjawaban dana desa yang harus selesai tepat waktu.

Menurut salah seorang warga Ridwan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur gedung diperlukan karena Desa Lamantu tidak memiliki gedung permanen untuk kantor Desa sehingga dulu terkesan amburadul.

Pembangunan ini memberi dampak yang cukup baik untuk masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan. Penulis melihat ini berdampak baik karena dalam perencanaan pembangunan masyarakat dilibatkan sampai dengan proses pembangunan. Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penggunaan anggaran dana desa penulis juga melakukan penelitian secara rinci dalam rangka mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Fauzi salah seorang

KESIMPULAN DAN SARAN

Anggaran yang bersumber dari pusat bernama Alokasi Dana Desa (ADD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa untuk menjadi lebih baik. Desa menjadi tonggak kemajuan negara secara utuh sehingga membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan. Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang efektifitas dana desa di desa Lamantu Kecamatan Pasimaranu

warga desa menyebutkan dari awal proses perencanaan diadakan rapat seluruh masyarakat untuk diputuskan hal-hal apa saja yang akan dibangun dan dijadikan prioritas dalam proses anggaran satu tahun pertanggungjawaban, Fauzi menambahkan dalam rapat di awal perencanaan juga dimusyawarahkan dan diputuskan pembangunan prioritas yang harus dikerjakan.

Menurut sekretaris Desa Lamantu H.Tamsil. Warga desa dilibatkan semuanya sampai dengan proses pelaksanaan dimana masyarakat juga sebagai pekerja dalam setiap item pekerjaan yang bersumber dari dana Desa. Ini menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat desa karena didominasi oleh petani yang pekerjaannya musiman. Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam tahap perencanaan dan pekerjaan masyarakat dilibatkan secara keseluruhan dan mereka yang memiliki skill dalam bagian bangunan akan dipakai sebagai mandor pembangunan dana masyarakat ikut membantu. Uraian hasil wawancara dan observasi penulis berkaitan dengan efektifitas dana desa di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya untuk desa Lamantu dipergunakan sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif dalam membangun infrastruktur desa.

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa:

a). Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Desa Lamantu sudah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Dengan penggunaan dana sebagai berikut:

1) Bidang
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lamantu
Bidang ini memerlukan dana Rp.470.936.712 dari total anggaran yang

disediakan. Bidang ini lebih fokus pada belanja pegawai dan operasional serta sistem administrasi Desa Lamantu Tahun Anggaran 2016.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang ini merupakan bidang prioritas yang hampir 64 % dari semua total anggaran digunakan untuk pembangunan. Sebanyak Rp. 641.158.281 digunakan untuk beberapa pembangunan atau peningkatan Jalan Desa, pembangunan Rabat Beton, pembangunan Prasarana Pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana Lainnya.

2. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Lamantu

Bidang ini menyerap 3 % dari total anggaran yang ada atau sejumlah Rp. 82.371.000 dengan beberapa program yang dilakukan seperti pembinaan Pemuda dan Olahraga, Kesenian dan Sosial Budaya, Penanggulangan Illegal Logging dan Illegal Fishing, Penghijauan Tingkat Desa, dan Pembinaan Pendidikan Santri.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamantu

Anggaran dalam bidang ini mencapai 15 % atau sekitar Rp. 237.809.228 Dalam bidang ini dilakukan beberapa hal yang dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat, kegiatan bantuan perbaikan Gizi buruk untuk Balita, Ibu hamil dan keluarga miskin, Kegiatan tim penggerak PKK, kegiatan orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD, kegiatan Kabupaten sehat, dan kegiatan peningkatan kapasitas peternakan/perikanan/pertanian.

a. Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Anggaran Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal.

Dan Desa Lamantu Termasuk Desa Swadaya karena Merupakan Desa yang

paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan budaya adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Perangkat pemerintahan dan Masyarakat Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2003 *Jalan Menuju Stabilitas. Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilm.

Arif Mauliddin. 2017. *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee, Banda Aceh*

Arifiyanto, Dwi febi dan Kurrohman, T. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan. Jember: Universitas Jember.

Aswandi, M. Sulpan. "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Ilmiah. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2014.

Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika.

Lala M Kolopaking Cila Apriande dan Rifar Syaharbian, 2016. *Mekanisme*

- Perencanaan Desa Membangun dan Membanngun Desa, Bogor*
Mardiasmo, AK. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustika Natsir, 2017. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembeng Bangkelekila*. Makassar.
- Nirwana Ahmad, 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.16 Tahun 2014*, Makassar.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta:LP3ES.
- Peraturan menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa,*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18*
- Puteri Ainorrohman Romantis. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Universitas Jember.
- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007)
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pendesaan*. (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013)
- Sri Lestari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyundono)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d). Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa.*
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Yuliani dkk.2010. *Tentang Pemerintahan Daerah*